

INTISARI

ANALISIS MENGENAI PERANAN OJK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT MENGATASNAMAKAN JAMINAN PELUNASAN KREDIT

(STUDI KASUS BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) CABANG KARANGASEM BALI)

Oleh: Ni Putu Tika Kumara¹

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatasnamakan jaminan pelunasan kredit bank di Bali dan sistem kerja Satgas Waspada Investasi dalam menindaklanjuti adanya pelaporan dari bank terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatasnamakan jaminan pelunasan kredit bank. Kemudian secara subjektif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni deskriptif dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan memilah-milah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaitkan dengan aturan yang relevan.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama peran OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatasnamakan jaminan pelunasan kredit bank di Bali dilakukan melalui peranan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah. Kedua, sistem kerja Satgas Waspada Investasi dalam menindaklanjuti adanya pelaporan dari bank terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat mengatasnamakan jaminan pelunasan kredit bank menjadi kewenangan keanggotaan Satgas Waspada Investasi antara lain OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Bentuk penanganan kasus UN Swissindo dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dengan memanggil ketua dari UN Swissindo untuk menandatangani surat pernyataan yang menghentikan kegiatan UN Swissindo.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Waspada Investasi, Penghimpunan Dana, Kredit.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE ROLE OF OJK IN OVERSEEING THE PUBLIC FUNDING ACTIVITY UNDER THE NAME OF LOAN REPAYMENT GUARANTEE

(CASE STUDY OF BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) BRANCH OF KARANGASEM)

By: Ni Putu Tika Kumara²

Research in this legal writing is objectively aimed to learn and analyze the role of OJK Region 8 of Bali and Nusa Tenggara in conduction oversight of the public funding activity under the name of bank loan repayment guarantee in Bali and the working system of Investment Alert Task Force in proceeding the bank's report toward the activity of under the name of bank loan repayment guarantee. Subjectively, this research is aimed to obtain the bachelor of law degree in Universitas Gadjah Mada.

The research in this Legal writing is a normative empirical legal research. The nature of research done by the writer is descriptive by explaining any matters which relates to the result of this research. This research utilized the qualitative method and the data in this legal writing is obtained from literature research and field research by selecting the data obtained by literature and field research which will arranged systematically and related with the relevant regulation.

In the result and explanation in this legal writing, there are two conclusions. First, the role of OJK Region 8 Bali and Nusa Tenggara in overseeing the public funding activity under the name of bank loan repayment guarantee in Bali is done through the oversight role, done by the local team of Investment Alert Task Force. Second, the working system of Investment Alert Task Force in proceeding reports from banks toward the public funding activity under the name of bank loan repayment guarantee, *inter alia*, OJK, The Indonesian National Police and Bank Indonesia. The settlement means of the case of UN Swissindo is done by the Investment Alert Task Force by calling the head of UN Swissindo for signing statement letter to stop all of the activities of UN Swissindo

Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi, Funding Activity, Credit

² Undergraduate Student of Dagang Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta